

Studi Semiotika Teks Diskursus “China Threat” di Kalangan Elit Indonesia

Zudan Rosyidi¹, Abu Fanani², Murni Fidiyanti³, Jauharoti Alfin⁴
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel^{1 2 3 4}
Email: zudanrosyidi@uinsa.ac.id

Diterima : 9 Januari 2024

Disetujui : 21 Februari 2024

Diterbitkan : 23 Februari 2024

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan diskursus Tenaga Kerja Asing (TKA) dan klaim sebagian wilayah Laut Natuna Utara (LNU) China. Secara aktif beberapa pihak dianggap sebagai aktor negara, seperti aparat pemerintahan dan aktor non-negara (*non state actor*) seperti politisi, akademisi, dan juga masyarakat awam membentuk diskursus tersebut. Metode penelitian yang digunakan mengintegrasikan antara metode semiotika teks dengan konsep sekuritisasi post-strukturalis. Semiotika dipergunakan untuk memilih dan menganalisis tanda (*sign*) dalam bentuk teks dan non teks serta sekuritisasi post-strukturalis sebagai model dalam menganalisis tanda (*sign*) tersebut. Para aktor ini memproduksi sejumlah tanda (*sign*) dalam bentuk indeks, ikon, dan simbol yang dinarasikan baik secara lisan maupun tulisan untuk merepresentasikan diskursus “China Threats” dalam kasus Natuna dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hasil analisis menunjukkan bahwa melalui tanda (*sign*) yang diproduksi pada kasus Natuna oleh elit pemerintahan (*state actor*) sama dengan elit non pemerintahan (*non-state actor*). Pemerintah mengarahkan kasus Natuna sebagai masalah sekuritisasi. Fakta yang berbeda didapatkan pada kasus TKA China. Elit non-pemerintah (*non-state actor*) memiliki kesamaan pandangan bahwa masalah tersebut harusnya dianggap sebagai ancaman dan masuk dalam proses sekuritisasi. Beberapa tanda sosial seperti kematian tenaga kerja Indonesia, diskriminasi upah, dan perlakuan yang semena-mena seharusnya dapat digunakan pemerintah untuk mengkerangkai kasus TKA sebagai diskursus sekuritisasi. Sebaliknya elit pemerintah (*state actor*) mengkonstruksi narasi bahwa TKA China sudah sesuai dengan perundang-undangan.

Kata Kunci: semiotika, teks diskursus, china threats, elit indonesia

Abstract

This research departs from the problem of discussions on Foreign Workers (TKA) and China's claims to parts of the North Natuna Sea (LNU) area. Actively several parties who are considered state actors, such as government officials and non-state actors such as politicians, academics, and also ordinary people shape this discourse. The research method used integrates text semiotic methods with post-structuralist securitization concepts. Semiotics is used to select and analyze signs in text and non-text form as well as post-structuralist securitization as a model in analyzing these signs. These actors produced a number of signs (signs) in the form of indices, icons and symbols which were narrated both orally and in writing to represent the discourse of the "Chinese Threat" in the Natuna and Foreign Workers (TKA) cases. The results of the analysis show that the signs produced in the Natuna case by government elites (state actors) are the same as non-government elites (non-state actors). The government is directing the Natuna case as a securitization issue. Different facts were obtained in the case of Chinese foreign workers. Non-government elites (non-state actors) have the same view that this problem must be considered as a threat and included in the securitization process. Several social signs such as the death of Indonesian workers, wage discrimination, and arbitrary treatment should be used by the government to frame the case of foreign workers as a discourse of securitization. On the other hand, government elites (state actors) construct a narrative that Chinese foreign workers are in accordance with statutory regulations.

Keywords: semiotics, text discourse, China threats, Elit Indonesia

PENDAHULUAN

Kemunculan negara China sebagai kekuatan global pasca runtuhnya Uni Soviet dapat dilihat melalui dua perspektif, yaitu sebagai kekuatan yang memberikan ancaman (*threat*) (Munro, 1999) (Manicom, 2012) dan atau sebaliknya membawa situasi yang damai (*peacefull*) (Xiaoming & Buzan, 2010). Kedua perspektif ini terbentuk dari pertumbuhan ekonomi China, perkembangan postur militer yang disertai dengan meningkatnya tensi di perbatasan wilayahnya dan persepsi terjadinya diseminasi ideologi komunis (Akgül & Renda, 2020) (Rogelja & Tsimonis, 2020).

Penempatan China sebagai ancaman, hadir melalui sejumlah kebijakan politik dan ekonomi yang membatasi aktivitas ekonomi China di sebuah negara seperti kasus penahanan pimpinan dan pembatalan kontrak kerja Huawei dan kasus CNOOC di Amerika Serikat (Campion, 2020) atau melalui sejumlah pernyataan dan diskursus yang menyerang kebijakan ekonomi dan politik Cina yang lazim dilontarkan oleh elit politik di Amerika Serikat (Yang & Liu, 2012). Sementara itu, suara yang mendukung bahwa China tidak dalam kerangka ancaman, datang dari kelompok negara yang memiliki irisan ekonomi yang kuat dengan Cina dan peran yang dominan dalam mengatasi masalah global. Buzan melihat gerak China dalam dimensi “*peacefully*” adalah dengan mendasarkan pada meningkatnya kepentingan China dalam masyarakat internasional, krisis ekonomi dunia, kemungkinan masalah lingkungan menjadi masalah kolektif yang mendesak untuk diselesaikan bersama, yang juga didorong oleh melemahnya kepemimpinan/hegemoni AS (Buzan, 2010).

Indonesia mengalami ancaman serupa dari China. Klaim China atas keseluruhan wilayah Laut China Selatan (LCS) melalui penetapan secara sepihak sembilan titik (*nine dash line*) yang melewati sebagian Laut Natuna menjadi sumber masalah ancaman tersebut. Klaim itu memunculkan konflik dengan Indonesia yang secara *de jure* dan *de facto* adalah pemilik sah dari wilayah tersebut (Ramli, Patrice, & Burhanuddin, 2021). Klaim ini menyeret Indonesia sebagai salah satu negara berkonflik dengan China atas wilayah Laut China Selatan (LCS) selain negara Vietnam, Malaysia, Jepang, Filipina, dan Brunei Darussalam (Wang, 2015).

Klaim wilayah ini disertai dengan upaya sistematis pemerintah China untuk menegaskan bahwa teritorinya tersebut dengan mengirimkan Pasukan Penjaga Pantai (*Coast Guard*) untuk berpatroli di wilayah yang diklaim tersebut. Bentuk lain yang digunakan untuk mempertegas klaim tersebut adalah dengan pencantuman peta wilayah negara China dalam buku paspornya.

Secara sistematis dilakukan upaya untuk meng-*counter* manuver China. Salah satu yang dilakukan adalah dengan penamaan ulang laut di utara Natuna dengan nama baru, Laut Natuna Utara. Sementara untuk menghalau kapal-kapal *coast guard* milik China, TNI AL secara rutin melakukan patroli. Atensi lain diberikan oleh Indonesia dalam bentuk kehadiran presiden Jokowi di wilayah laut yang diklaim China tersebut.

Diskursus *China Threat* lain yang tidak kalah penting adalah terkait investasi China. Di beberapa negara, investasi ini berujung pada pengambilan sejumlah aset penting sebuah negara karena ketidakmampuan untuk membayar hutang. Disisi lain investasi ini disertai dengan kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) China (Wahyu, Raharjo, & Damayanti, 2022). Tidak hanya tenaga ahli, tetapi juga tenaga kasar yang sebenarnya dapat dilakukan

masyarakat setempat. Di media sosial kehadiran TKA China ini dipersepsikan telah merebut “lahan ekonomi” masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah. Diskursus tentang TKA China ini menjadi semakin panas ketika masuk pada momen politik yaitu pemilihan presiden.

Pergerakan kekuatan militer dan investasi China ini menjadi diskursus yang ditulis dengan beragam sudut pandang dan *framing* tertentu di media massa. Informasi ini dikonstruksi dengan mendasarkan pada peristiwa yang terjadi dan dalam beberapa artikel dimunculkan pernyataan dari aktor-aktor di Indonesia atas tindakan China tersebut. Para aktor tersebut memproduksi sejumlah tanda (*sign*) dalam bentuk indeks, ikon, dan simbol yang dinarasikan baik secara lisan maupun tulisan untuk merepresentasikan diskursus *China Threats* dalam kasus Natuna dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Tanda (*sign*) ini sering merepresentasikan wujud dari kebijakan negara dibandingkan dengan statemen resmi pemerintah Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka Teori Semiotika yang dikembangkan oleh Pierce (Pierce, 1982) yang dipadupadankan dengan teori sekuritisasi (*securitization*) dari Buzan et al (Buzan, Weaver, & Wilde, 1998) dalam bingkai Post Strukturalis yang dikembangkan oleh Hansen (Hansen, 2012) dan Song (Song, 2015). Konsep yang dibuat oleh Pierce memandu dalam mengidentifikasi dan menemukan teks-teks yang diproduksi oleh elit yang kemudian dianalisis dengan konsep sekuritisasi post-strukturalis untuk menemukan apakah isu tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap negara atau bukan.

Semiotika adalah ilmu tentang tanda (*sign*). Saussure dalam “*Course in General Linguistics*” menjelaskan bahwa ilmu ini menjelaskan bagaimana tanda (*sign*) berperan dalam kehidupan sosial (De Saussure, 1990). Piliang mendeskripsikan peran tersebut ketika sistem penandaan ditempatkan sebagai bagian dari struktur sosial yang secara eksplisit menandakan bahwa tanda (*sign*) adalah bagian dari aturan-aturan sosial. Pendapat ini menggaris bawahi bahwa sistem tanda (*sign system*) berjalan seiring atau berkelindan dengan sistem sosial (*social system*) (Piliang, 2004).

Pada ruang lain penggunaan tanda (*sign*) ini menjadi pintu masuk dalam menganalisis isu sekuritisasi (*securitization*) dalam kajian Hubungan Internasional (HI) (Song, 2015). Hansen (Hansen, 2012) menjelaskan bahwa konsep sekuritisasi dari Buzan yaitu *speech act*, *existensial threat*, *referent objects*, dan *functional actor* hanya mendeskripsikan bahasa, aktor, dan tindakan yang terbentuk pada satu isu sekuritisasi dengan meniadakan hubungan diskursus sekuritisasi dalam membentuk objek sekuritisasi. Artinya, tidak hanya sekadar melihat ada atau tidak isu sekuritisasi, tetapi lebih pada bagaimana artikulasi dan performansi dari wacana sekuritisasi dan aktor yang melakukannya tidak hanya *state*, tetapi juga *non-state* (Song, 2015). Hansen dan Song mengembangkan tiga konsep analisis, yaitu *scientific theory*, *normative analogy*, dan *political myth*.

Objek penelitian ini adalah tanda (*sign*) berupa teks dan non-teks bahasa yang berada di media massa *online* di Indonesia yang terdapat dalam diskursus Laut Natuna Utara (LNU) dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Tanda (*sign*) ini dapat berupa indeks, ikon, dan simbol.

Pada tahapan selanjutnya, tanda (*sign*) tersebut dikontekskan dengan nilai sosial politik yang diterjemahkan oleh elit Indonesia sehingga akan terlihat apakah akan memproduksi isu Laut Natuna Utara (LNU) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai wacana ancaman atau tidak bagi pemerintah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***China Threat* dalam bingkai Model Ilmiah**

Pembingkiaan diskursus *China Threat* menempatkan penalaran rasional sebagai salah strategi. Model diskursus ini dapat banyak ditemukan melalui sejumlah statemen dari para aktor baik *state* maupun *non-state* di media massa mainstream yang ini membedakan dengan dua model diskursus lainnya yang menggunakan media sosial sebagai saluran artikulasinya.

Dalam bingkai model diskursus ini, ancaman dinarasikan dengan menggunakan tanda (*sign*) berupa statemen yang dapat dipahami dan masuk akal. Statemen berisikan bahasa lisan sebagai bentuk simbolisasi atas *eksistensial threat* atas Laut Natuna Utara (LNU) dan TKA China di Indonesia. *Functional actor* yang menjadi bagian dari wacana ini adalah para pejabat pemerintah, militer, pegiat NGO (*non Governmental Organization*) dan akademisi.

Pada kasus Laut China Selatan terlihat para aktor dalam membuat statemen. Mereka sangat berhati hati dalam menata pilihan kata dan kalimat. Salah satu variabel yang dapat menjelaskan kehati-hatian ini adalah terkait dengan hubungan diplomatik dan ekonomi yang tejalin diantara Indonesia dengan pemerintah China sehingga statemen yang dibuat diharapkan memiliki makna positif sehingga tidak mengundang protes dan ketidaksukaan pemerintah China.Terkait dengan pengedepanan ini dapat dibaca pada statemen dari Dahnil Anzar Simanjuntak (Staf Khusus Menhan) yang dimuat di cnbcIndonesia pada tahun 2020.

Dari 18 data tentang *China Threats* di Laut Natuna Utara, sebanyak 16 statemen menggunakan bahasa yang memiliki makna bahwa respon atau tindakan Indonesia adalah bagian dari upaya untuk menegaskan kedaulatan, menjaga teritorial, menjaga kepentingan nasional, dan bagian dari hukum internasional.

Tabel 1. Tanda (*sign*) dari Statemen Aktor *State* dan *Non State* dalam Isu Laut Natuna Utara (LNU)

No	Data ke	Tanda (<i>sign</i>)
1	1	zona damai
2	2	kedaulatan Indonesia
3	3	kedaulatan Indonesia
4	6	kedaulatan wilayah
5	7	penegasan kedaulatan
6	8	menjaga wilayah
7	9	peningkatan sistem pertahanan
8	10	penegasan wilayah UNCLOS
9	11	kedaulatan wilayah
10	12	menjaga wilayah
11	13	perlindungan kepentingan nasional
12	14	perlindungan kepentingan nasional
13	15	hukum internasional
14	16	mempertahankan hubungan ekonomi

15	17	menjaga laut teritorial
16	18	menjaga wilayah

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia menjadikan klaim China atas sebagian wilayah laut Indonesia di Laut China Selatan menjadi dasar untuk melakukan proses sekuritisasi yang ditandai dengan menamai Laut Natuna Utara pada peta baru NKRI. Penetapan *Nine Dash Line* China dalam peta nasionalnya dan kemudian diikuti dengan langkah yang sistematis berupa pengiriman kapal perang dan patroli di wilayah tersebut dipersepsikan dapat mengancam kedaulatan wilayah Indonesia. Kebijakan penamaan ini secara tidak langsung merefleksikan model perlawanan halus (*low-profile*) terhadap klaim Sembilan Garis Putus-putus Tiongkok (*Tiongkok's Nine Dash Line*) dan perilaku ekspansif Tiongkok yang seringkali melanggar ZEE negara-negara tetangganya (Hunt, 2017). Meskipun demikian dalam beberapa berita terpublikasikan bahwa terjadi peningkatan fasilitas militer Indonesia di pulau Natuna.

Sejak kapal-kapal China masuk secara ilegal di wilayah Indonesia, pemerintah mengkampanyekan untuk pengedepanan tata perilaku dalam kerangka penciptaan Laut China Selatan (LCS) yang damai, stabil, dan bebas untuk dilewati oleh semua negara. Konstruksi bahasa atas ancaman ini menjadi pola "*speech act*" yang dapat dijumpai sejak munculnya klaim China tersebut seperti yang pernah dikatakan oleh Purnomo Yusgiantoro (Menteri Pertahanan) di sebuah media online pada tahun 2017.

China menganggap wilayah ZEE Indonesia tumpang tindih dengan klaim wilayah dalam Sembilan Garis Putus-putus-nya (Wang, 2015). Pada akhirnya terjadi sejumlah insiden dalam beberapa tahun terakhir terdapat kasus nelayan Indonesia yang ditangkap dan sebaliknya juga terjadi kapal TNI AL yang menangkap nelayan Tiongkok di kawasan tersebut karena tumpang tindih klaim (Connelly, 2017).

Indonesia menjelaskan tumpang tindih ini dengan mengacu pada tata aturan hukum internasional, yaitu UNCLOS yang disepakati oleh komunitas internasional pada tahun 1982. Pemerintah Indonesia secara tegas mengatakan bahwa klaim sepihak China itu tidak memiliki dasar yang secara konsisten disuarakan sejak tahun 2017.

Statemen terkait dengan *referent object* juga memperlihatkan satu logika yang rasional. TNI AL dan Bakamla sebagai garda terdepan pemerintah, melakukan semua tindakan dalam kerangka pengamanan wilayah. Tidak bersifat ofensif karena dilakukan pada wilayah teritori dan tidak mengancam keselamatan pihak-pihak yang secara ilegal masuk wilayah perairan (Fajri, 2020). Bahkan dalam beberapa statemen tampak berusaha untuk menghindari sikap-sikap bahkan statemen yang konfrontatif yang dapat menyebabkan konflik terbuka dengan China.

Dinamika terjadi pada kasus TKA China di Indonesia. Isu ini tidak dianggap sebagai satu ancaman pada ekonomi masyarakat oleh pemerintah. Sejak kasus TKA China menjadi perbincangan dan pembahasan media di tahun di Februari 2015 hingga tahun 2023, pemerintah tidak mengkonstruksi isu TKA sebagai masalah sekuritisasi. Namun, sebaliknya para *non-state actor* justru menjadikan isu ini sebagai satu ancaman nyata bagi masyarakat

Indonesia. Kelompok ini yang *men-declare* bahwa TKA merupakan sebuah ancaman melalui simbol dalam *speech act* yang terekam di media massa.

Hipotesa ini dapat dilihat pada hasil analisis semiotika. Dalam analisis ini ditemukan bahwa simbol TKA China mengarah pada diskriminasi, eksploitas, dan ketidakadilan yang didapatkan dari sejumlah aktor non-state, tetapi sebaliknya aktor state melihatnya dalam bingkai politis dan dalam tataran normatif.

Berikut ini makna yang muncul dari simbol yang ada pada statemen dari aktor-aktor *non-state*.

Tabel 2. Tanda (*sign*) dari Statemen Aktor non-State pada Isu TKA

No	Data ke	Tanda (<i>sign</i>)
1	19	bom waktu
2	20	diskriminasi pekerja
3	21	perbedaan budaya
4	22	diskriminasi upah
5	25	lemahnya pengawasan
6	26	ketertutupan dan ketidakterbukaan pemerintah
7	31	Aturan yang longgar

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Hampir sebagian besar aktor *non-state* mengatakan bahwa TKA China adalah ancaman atas pekerja Indonesia. Konstruksi wacana ke publik berisikan tentang 1) budaya kerja yang berbeda diantara perusahaan dan buruh China dengan Indonesia, 2) diskriminasi upah yang tajam antara pekerja Indonesia dengan China, 3) lemahnya pengawasan atas TKA China sehingga banyak ditemukan buruh kasar dari China yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh perusahaan, dan 4) pemerintah terkesan menutupi terkait dengan masalah TKA China dan menutup mata atas beberapa kejadian dan konflik yang terjadi seperti dikatakan oleh Ubadillah Badrun, Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta.

Sebaliknya konstruksi yang dibuat oleh aktor state mengarah pada satu framing bahwa masalah TKA adalah persoalan yang sengaja digiring pada ranah politis seperti yang diungkapkan oleh Hanif Dzakiri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada masa pemerintahan periode pertama presiden Jokowi, mengatakan.

“...Jelas terlihat framing politiknya. Ketika Dirjen Imigrasi bilang 1,3 juta turis China masuk Indonesia tahun ini, langsung diplesetkan menjadi TKA China. Penangkapan beberapa TKA ilegal di daerah oleh aparat pemerintah langsung digoreng jadi ribuan, bahkan jutaan”(www.news.detik.com)

Secara garis besar statemen aktor *state* memiliki makna yang mengkaitkan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. Masuknya TKA sudah sesuai dengan aturan dengan menjelaskan bahwa mereka datang dan melakukan kerja-kerja terkait dengan TKA sesuai dengan koridor hukum. Secara garis besar dapat dipetakan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3. Tanda (*sign*) dari Statemen Aktor State pada Isu TKA

No	Data ke	Tanda (<i>sign</i>)
1	23	patuh pada aturan
2	24	Investasi asing di Indonesia
3	28	hanya untuk pembukaan
4	29	isu politis
5	30	pemberian izin sementara
6	32	penegakan hukum atas TKA

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

Satu hal yang menarik dan menjelaskan mengapa aktor-aktor begitu berhati-hati baik dalam bersikap terhadap TKA China adalah masalah investasi. Arus investasi yang masuk berjalan seiring dengan kehadiran TKA yang kesemuanya telah diatur dalam perjanjian kerja baik secara G to G (*government to government*) atau yang menggunakan skema B to B (*business to business*). Positioning ini ditegaskan oleh Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada masa pemerintahan periode kedua presiden Jokowi yang mengatakan “Kenapa jumlah TKA China lebih besar? Ini tentu saja karena banyak investasi yang masuk ke Indonesia yang berasal dari China.. (www.cnbcindonesia.com)

Kebijakan yang diambil pemerintah dikonstruksi oleh masing-masing aktor dengan menggunakan acuan pada aturan atau hukum dan dilakukan secara selektif dan hati-hati. TKA datang ke Indonesia dengan mematuhi aturan perizinan yang sifatnya temporal (hanya 6 bulan) dan bidang kerja yang dilakukan ada pada wilayah penyiapan fasilitas industri, tidak pada sektor produksi.

Pada tahun 2020 ketika di media muncul berita tentang kedatangan TKA China di beberapa bandara padahal pada saat yang sama pemerintah melakukan kontrol yang ketat pada aktivitas sosial masyarakat, aktor-aktor pemerintah mengatakan bahwa kedatangan para pekerja tersebut sudah mengikuti prosedur ketataketenagakerjaan dan sekaligus juga aturan pemerintah terkait dengan usaha untuk menekan penyebaran virus Corona seperti yang dikatakan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly di media detikcom pada tahun 2020 (www.news.detik.com)

Untuk meminimalkan persepsi atau pandangan bahwa pemerintah abai atau membiarkan persoalan TKA, khususnya terkait dengan kemampuan berbahasa Indonesia, pada beberapa media muncul aktivitas dari kementerian atau dinas dibawahnya yang melakukan operasi atau razia terhadap sejumlah perusahaan yang menggunakan pekerja asing dari China. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan razia ini yang langsung dipimpin oleh Hanif Dakiri. Dalam satu wawancara ketika dilakukan razia, dia mengatakan

“Mohon maaf ya kalau yang seperti ini saya sensitif, kita ini ya, untuk kirim TKI untuk PRT (Pekerja Rumah Tangga) saja harus kita *training* bahasa Arab, masa mereka yang jadi manager di Indonesia belajar bahasa Indonesia saja enggak mau” (www.money.kompas.com)

Aktivitas yang sama dilakukan oleh dinas tenaga kerja di daerah. Mereka secara aktif melakukan sejumlah razia yang dikonstruksi ke publik sebagai upaya penegakan

hukum untuk itu diberikan sanksi kepada perusahaan yang kedapatan melakukan pelanggaran. Aparat pemerintah datang ke sejumlah perusahaan untuk mengecek dokumen kerja seperti yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur dan dinas sejenis di provinsi lainnya.

Konstruksi lain yang dibuat terkait dengan TKA China adalah berupa statemen bahwa TKA juga datang dari negara lain, seperti Taiwan, Hongkong, Eropa, dan Amerika. Para aktor menegaskan bahwa tidak hanya TKA yang datang bekerja di Indonesia. Kondisi ini adalah sebuah keniscayaan dengan melihat keterlibatan Indonesia pada tatanan ekonomi global yang mengharuskan wilayahnya terbuka dengan arus tenaga kerja luar, "...Tidak hanya TKA China akan tetapi ada juga TKA India...."

China Threat sebagai Mitos Politik

Model *speech act* yang dipergunakan untuk mengkonstruksi *China Threat* sebagai suatu mitos politik dapat dikategorikan sebagai teks dengan genre populer. Teks ini menggunakan diksi yang tidak formal, tidak baku, dan banyak digunakan oleh masyarakat di media digital. Jenis teks ini bersifat resiprokal yang menggambarkan hubungan timbal balik antara *speech act* dengan "sekuritisasi" di sebuah negara (Buzan et al., 1998).

Dalam beberapa kasus *speech act* LNU dan TKA China berdampak pada munculnya keterancaman masyarakat atau negara dan juga sebaliknya. Pada kasus lain, ancaman ini dapat muncul sebagai kesadaran atau sebagai hasil konstruksi dari aktor-aktor tertentu, baik yang datang dari *state* maupun *non-state*. Sebagai sebuah kesadaran, ancaman tumbuh pada aktor masyarakat tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari aktor-aktor yang berkepentingan melalui statemen. Tumbuh pada individu atau kelompok masyarakat sebagai proses yang eksistensial sebagai respon langsung atas satu tindakan atau wacana yang dibuat oleh pihak lain. Sementara sebagai hasil konstruksi, muncul aktor-aktor yang secara intersubjektif mensosialisasikan adanya ancaman. Secara aktif, para aktor ini mengkonstruksi isu keamanan yang patut dianggap sebagai ancaman.

Salah satu karakteristik penting *speech act* ini terkait dengan konten yang tidak selalu bersifat faktual. Tujuan sebenarnya dari pembuatan konten tersebut adalah untuk meyakinkan masyarakat tentang urgensinya dan kemudian mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Modus ini antara lain menggunakan retorika, visual, pertunjukan seni, ritual, dan praktik sosial lainnya yang bergantung pada faktor askriptif yang melekat pada aktor seperti etnis, ras, budaya, dan peradaban. Berbeda dengan model ilmiah dan analogis, model diskursus sekuritisasi ini mendasarkan pada logika psikologis intuitif daripada logika deduktif atau induktif.

Dalam kasus ekstrim, ancaman ini bisa menjadi diskriminasi yang terbuka. Dalam modus mitos politik, isu ancaman China memasukkan wacana tentang budaya dan peradaban secara struktural. Dengan pemasukan ini, isu tersebut tidak menjadi masalah keamanan karena hal ini ditempatkan pada konteks yang lebih luas yaitu China yang sedang memperluas ekspansi ke seluruh dunia. Namun, tujuan sebenarnya dari model mitosisasi sekuritisasi adalah untuk membangun konstruksi tentang ancaman China yang berujung pada seruan untuk melakukan perlawanan (Rose, 2010).

Konstruksi *China Threat* sebagai mitos tidak ditemukan pada kasus Natuna. Sebaliknya pada kasus TKA China muncul mitos-mitos politik yang dibuat oleh sejumlah aktor *non-state*. Mitos ini terkait dengan kebangkitan komunisme yang disokong oleh pemerintah Tiongkok melalui warganya yang datang ke Indoensia sebagai tenaga kerja yang digambarkan sebagai tentara Tiongkok yang menyamar. Sebagian besar aktor-aktor ini menjadi kelompok yang secara politik memang tidak ketemu dengan penguasa.

TKA China menjadi isu politis yang selalu ramai menjelang momen politik. Terdapat tiga pola yang sering digunakan, yaitu membuat kisah/cerita meyakinkan melalui situs abal-abal, menggunakan angka bombastis, manipulatif atau palsu, memainkan foto insidentil atau hoax lalu digeneralisasi, dan memviralkan itu semua di sosial media, terutama facebook, twitter dan whatsapp group.

***China Threat* sebagai Analogi Normatif**

Frame sekuritisasi dalam bentuk analogi normatif dapat ditemukan pada sejumlah teks jurnalisme dan sumber naratif lainnya seperti karya seni, sastra, buku. Semua sumber ini bertemu pada satu titik bahwa karya tersebut menggunakan gaya yang sesuai dengan selera masyarakat terpelajar.

Pembuatan analogi sejarah dan masa kini merupakan salah satu cara untuk menyatakan bahwa masalah TKA China dan LNU merupakan isu sekuritisasi yang perlu untuk mendapatkan respon serius dari pemerintah dan masyarakat. Dengan menggunakan mode penalaran analogis ini, struktur wacana ancaman China diletakkan pada posisi antara ideologi politik dengan subyektifitas.

Sejumlah aktor mengaitkan kemungkinan ancaman China dengan peningkatan nasionalisme ekstrim yang bersifat negatif yang dikembangkan oleh pemerintah China. Mereka memperhatikan kebangkitan kuat negara itu jauh lebih awal daripada banyak negara lainnya. Mereka mengkonstruksi bahwa China memang tidak dapat dipahami sebagai “penjahat” atau “negara penakluk”, tetapi negara tersebut dapat dikategorikan sebagai “negara yang ambisius”.

Argumen semacam itu melibatkan politik identitas. Pendekatan Post-Strukturalis terhadap pembentukan identitas menekankan dualisme yang menyusun pengalaman manusia dalam frame oposisi biner. Namun, ketika seseorang mencoba membangun identitasnya, struktur luar selalu menjadi pusat dari struktur dalam. Sebaliknya, ketika seseorang membangun identitas antagonis, struktur dalam sangat penting untuk konstruksi struktur luar.

Argumen sejumlah penulis mengarah pada perbedaan China dengan demokrasi Barat. Menghubungkan China dengan Nazi Jerman dan militeris Jepang pada paruh pertama abad ke-20 sebagai cara untuk memperkuat kritiknya terhadap pemerintah China melalui simbol-simbol otoritarianisme. Dengan cara ini, China digambarkan berbeda dari negara-negara Barat yang normal, yang direpresentasikan sebagai benar, baik, pantas, dan berharga. Dalam konteks ideologi politik yang lebih luas, modus analogi normatif membutuhkan episteme pengetahuan yang tepat. Dengan kata lain, pelaku sekuritisasi harus menggunakan analogi bahasa dan konteks yang tepat agar berhasil mengartikulasikan sepenuhnya ancaman China melalui sejumlah statemen di media.

Analogi sejarah adalah cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan khalayak yang biasanya menganggap contoh dan preseden konkret bersifat persuasif. Para aktor yang mengkonstruksi pemikiran model ini dengan membandingkan model pemerintah China dengan Indoensia dan negara demokrasi lainnya. China dianggap tidak memiliki sistem pemerintahan yang liberal yang memiliki potensi untuk mengancam keamanan negara-negara di sekira China.

PENUTUP

Pada diskursus Laut Natuna Utara (LNU), tanda (*sign*) yang digunakan oleh para elit Indonesia, baik aktor state dan non state, memiliki kesamaan. Dari 18 data tentang *China Threats* di Laut Natuna Utara, sebanyak 16 statemen menggunakan bahasa yang memiliki makna bahwa respon atau tindakan Indonesia adalah bagian dari upaya untuk menegaskan kedaulatan, menjaga teritorial, menjaga kepentingan nasional, dan bagian dari hukum internasional. Secara garis besar statemen aktor *state* memiliki makna yang mengerucut pada wacana yang ada dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di level nasional dan internasional.

Pemerintah secara nyata melihat ini sebagai sebuah ancaman dan kemudian menyusun skema tindakan untuk menegaskan kedaulatan pada satu sisi dan pada sisi lain tidak membuat pemerintah China marah yang dapat mengganggu hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia dengan pemerintah China. Tindakan pertama yang diambil adalah dengan mengubah nama laut natuna di peta NKRI menjadi Laut Natuna Utara. Tindakan ini kemudian disusul dengan upaya sistemik untuk memperkuat postur angkatan laut dan udara di Natuna dengan persenjataan yang dianggap memiliki efek deteran. Hal yang berbeda didapatkan pada tanda (*sign*) yang digunakan oleh para elit ketika mengkonstruksi *China Threats* pada kasus TKA China. Elit Indonesia yang menjadi bagian dari pemerintahan tidak melihatnya sebagai simbol diskriminasi, eksploitasi, dan ketidakadilan, tetapi sebaliknya melihatnya dalam bingkai politis dan dalam tataran normatif.

Pada kasus TKA China, pemerintah tidak mengkonstruksinya sebagai proses sekuritisasi. Pemerintah sangat berhati-hati mengambil tindakan dan memberikan statemen ke masyarakat. Pemerintah berusaha meredam isu dan ketakutan masyarakat atas kehadiran TKA China tersebut dengan tanda (*sign*) yang mengacu pada makna normatif sesuai dengan hukum ketatatanagakerjaan yang berlaku.

REFERENSI

- Akgül, O., & Renda, K. K. (2020). Reconsidering power in international relations. *Chinese Political Science Review*, 5(3), 332–354. <https://doi.org/10.1007/s41111-020-00151-4>
- Buzan, B. (2010). China in International Society: Is “Peaceful Rise” Possible? *The Chinese Journal of International Politics*, 3(2), 5–36. <https://doi.org/10.1093/cjip/pop014>
- Buzan, B., Weaver, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Campion, A. S. (2020). From CNOOC to Huawei: Securitization, the China Threat, and Critical Infrastructure. *Asian Journal of Political Science*, 28(1), 47–66. <https://doi.org/Asian Journal of Political Science>
- Connelly, A. L. (2017). Indonesia’s new North Natuna Sea: What’s in a name? Retrieved

- from Lowy Institute website: [www.lowyinstitute.org/the-interpreter/ indonesia-s-new-north-natuna-sea-what-s-name](http://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-new-north-natuna-sea-what-s-name)
- De Saussure, F. (1990). *Course in General Linguistics*. London: Duckworth.
- Fajri, M. B. (2020). Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 546–560.
- Hansen, L. (2012). The Politics of Securitization and the Muhammad Cartoon Crisis: A Post-structuralist Perspective. *Security Dialogue*, 4(2), 357–369.
<https://doi.org/10.1177/0967010611418999>
- Hunt, L. (2017). Indonesia New North Natuna Sea: A Response to an Old China Problem. Retrieved from www.thediplomat.com
- Manicom, J. (2012). Canadian debates about China's rise: Whither the 'China threat'? No Title. *Canadian Foreign Policy Journal*, 18(3).
<https://doi.org/10.1080/11926422.2012.737337>
- Munro, R. H. (1999). Taiwan: what China really wants. *National Review*, 51(19), 45–49.
- Pierce, C. S. (1982). *No Logic as Semiotics: The Theory of Sign*. Blomington: Indiana University Press.
- Piliang, Y. A. (2004). Semiotika Teks: Sebuah Pendekatan Analisis Teks. *Mediator*, 5(2), 189–198. <https://doi.org/10.29313/mediator.v5i2.1156>
- Ramli, R. P., Patrice, L., & Burhanuddin. (2021). Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1(1), 20–35.
- Rogelja, I., & Tsimonis, K. (2020). Narrating the China threat: Securitising Chinese economic presence in Europe. *The Chinese Journal of International Politics*, 13(1), 103–133. <https://doi.org/10.1093/cjip/poz019>
- Rose, C. (2010). 'Managing China': Risk and risk management in Japan's China policy. *Japan Forum*, 22(1), 149–168. <https://doi.org/10.1080/09555803.2010.488950>
- Song, W. (2015). Securitization of the "China Threat" Discourse: A Poststructuralist Account. *China Review*, 15(1), 145–169.
- Wahyu, L., Raharjo, C., & Damayanti, A. (2022). Mengapa indonesia mengambil lebih banyak pekerja asing China. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 811–817.
- Wang, Z. (2015). Chinese Discourse on the "Nine Dash Line": Rights, Interests, and Nationalism. *Asian Survey*, 35(3), 502–524.
- Xiaoming, Z., & Buzan, B. (2010). Debating China's Peaceful Rise. *The Chinese Journal of International Politics*, 3(4), 447–460. <https://doi.org/10.1093/cjip/poq017>
- Yang, Y. E., & Liu, X. (2012). The 'China threat' through the lens of US print media: 1992–2006. *Journal of Contemporary China*, 21(76), 695–711.
<https://doi.org/10.1080/10670564.2012.666838>